

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Wisnu Harviano Wibowo¹ Indu Kirana²

^{1 2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie,
Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Administrasi Jakarta Pusat dalam memberikan informasi terbaik yang disajikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan yang tersaji. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode analisis yang digunakan adalah SmartPLS untuk menguji hipotesis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak delapan puluh delapan pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota panitia pemungutan suara kecamatan (PPK) dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang telah bekerja selama minimal lima tahun di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hasil penelitian baik secara simultan atau sebagian mendukung hipotesis bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Administrasi Jakarta Pusat.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of applying accounting information systems, internal control systems, and accountability to the quality of financial reports at the Office of the General Elections Commission of the City of Jakarta, Central Jakarta Administration in providing the best information presented to the public so as to increase the level of public confidence in the quality of financial statements presented. The sampling technique in this study uses the census method. The analytical method used is SmartPLS to test hypotheses. The samples used in this study were eighty eight employees of the Office of the General Election Commission (KPU), members of the district election committee (PPK) and members of the voting committee (PPS) who had worked for at least five years at the Office of the General Election Commission of the City Administration Jakarta Center. The results of the study either simultaneously or partially support the hypothesis that the application of accounting information systems, internal controls, and accountability affects the quality of financial reports at the Office of the General Elections Commission of the City of Jakarta, Central Jakarta Administration.

Keywords: Accounting Information Systems, Internal Control, Accountability, Quality of Financial Statements

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia usaha. Dalam persaingan dunia usaha, teknologi informasi yang dapat menyediakan sumber informasi secara relevan, tepat, akurat dan lengkap telah menjadi kebutuhan, hal tersebut diungkapkan oleh Calista (2014). Para manajer menggunakan informasi akuntansi untuk membantu mereka dalam mengevaluasi operasi/aktivitas bisnis yang sedang berjalan dan merencanakan operasi/aktivitas bisnis perusahaan yang akan datang, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, hal tersebut diungkapkan oleh Sajady & Datsgir (2008).

Informasi akuntansi yang berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan merupakan bagian dari informasi penting yang diperlukan oleh manajemen. Agar data keuangan yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk yang sesuai dengan suatu sistem yang mengatur arus kas dan pengolahan data akuntansi dalam organisasi, hal tersebut diungkapkan oleh Sutabri (2004).

Menurut Krismiaji (2010), sistem informasi akuntansi keuangan adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam melakukan suatu perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban laporan keuangan dalam suatu organisasi. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik ketika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, hal tersebut diungkapkan oleh Emilda (2014).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang akuntansi, pelaporan keuangan ada atau tidaknya kecurangan dalam suatu organisasi akan dapat mudah diketahui. Terdapat tiga faktor yang

mempengaruhi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan, yaitu adanya peluang atau kesempatan untuk melakukannya, adanya tekanan yang mendorong pelaku untuk melakukannya dan adanya karakteristik pribadi yang pada dasarnya untuk melakukan kecurangan, hal tersebut diungkapkan oleh Priantara (2013).

Terselenggaranya pilkada serentak sebenarnya dapat meningkatkan perekonomian daerah yang ikut serta melaksanakannya. Informasi yang dikutip dari Beritasatu.com (2018), Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa anggaran pilkada dan pemilu mempunyai pengaruh atau dampak terhadap perekonomian masyarakat. Pertama, menurut pendapatnya, ada sekian ribu petugas KPU yang dibayar setiap bulannya mulai dari PPK, PPS, termasuk PPDP dan KPPS. Kedua, menurut Pramono, KPU juga akan mengeluarkan anggaran-anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis, Ketiga, pengadaan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye, baik yang dibiayai oleh KPU maupun oleh kandidat secara mandiri, itu juga mendorong sektor dunia usaha percetakan. Antisipasi agar tidak terjadi kebocoran anggaran tersebut, KPU melakukan banyak strategi yang sudah diterapkan, seperti melalui bimtek

keuangan secara berkala, verifikasi laporan keuangan oleh inspektorat secara berkala, pola pelaporan keuangan dengan aplikasi sistem informasi dan seluruh pengadaan barang dan jasa menggunakan SILOG dan e-katalog, strategi dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran pilkada dan pemilu, ungkapnya. Anggaran pilkada serentak 2017 di 171 daerah sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani sebesar Rp 11.929.075.433.219,00. Anggaran pilkada ini tersebar di 17 KPU provinsi sebesar Rp 7.248.728.348.812,00 dan 154 KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp 4.680.347.084.407,00 sementara anggaran KPU RI untuk tahun 2017 sebesar Rp 12.508.650.264.000,00. Anggaran ini terdiri dari anggaran rutin KPU sebesar Rp 1.637.490.000.000,00 dan anggaran untuk tahapan pilkada 2017 sebesar Rp 12.508.650.264.000,00.

Fenomena yang terjadi dalam laporan keuangan telah melalui proses audit yang cukup panjang masih terdapat temuan dengan nilai meterial yang rendah dan adanya pengembalian dengan nominal yang cukup rendah pada laporan keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat. Peningkatan kualitas laporan keuangan yang dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Administrasi Jakarta Pusat akan menjadi lebih baik kualitasnya.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan laporan keuangan, perkembangan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu organisasi akan berdampak secara nyata dalam pemrosesan data dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculannya *software* akuntansi yang akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan, hal tersebut diungkapkan oleh Wardani (2017).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015), menghasilkan hipotesis bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif

terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Berbeda dengan hasil penelitian Wardani (2017) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi laporan keuangan yang berkualitas adalah akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut hal tersebut diungkapkan oleh Setyowati (2016). Faktor tersebut dibutuhkan juga oleh pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut Fajar *et al.* (2017) tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yang menyatakan masih kurangnya penerapan akuntabilitas pada laporan keuangan KPU Kabupaten Konawe. Perbedaan hasil penelitian dan masih banyaknya organisasi pemerintahan

yang belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pendorong dan daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk menganalisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan; 2) apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan; 3) apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kualitas Laporan Keuangan Pilkada DKI Jakarta

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain, hal tersebut diungkapkan oleh Nordiawan (2012). Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian standar akuntansi pemerintah yang digunakan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik, hal tersebut diungkapkan oleh Kusumah (2012).

Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang mana merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Menurut Tanjung (2008), laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Keputusan KPU Nomor 44 Tahun 2016 tentang elemen-elemen laporan keuangan adalah sebagai berikut; 1) Laporan realisasi anggaran; 2). Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 3). Neraca; 4). Laporan operasional; 5). Laporan arus kas; 6).

Laporan perubahan ekuitas; 7). Laporan aktifitas keuangan; 8). Catatan atas laporan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur juga, hal tersebut diungkapkan oleh Midjan & Susanto (2001). Tujuan sistem informasi akuntansi meliputi: untuk bagian fundamental dalam pendidikan akuntansi, untuk keterampilan dalam bidang sistem informasi akuntansi penting mendukung keberhasilan karir dan untuk komponen kunci dalam proses pembuatan keputusan.

Sistem informasi adalah salah satu sistem yang vital di dalam sebuah organisasi. Romney & Steinbart (2017) menjelaskan bahwa sistem informasi dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, agar dapat membuat aktivitas organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut Apriani (2004), menjelaskan bahwa terdapat enam fungsi dalam sistem informasi akuntansi, antara lain; 1) pengumpulan data atau transaksi; 2) pemerosesan data atau transaksi; 3) pemanajemenan data; 4) pengendalian dan pengamanan data; 5) pengadaan informasi.

Daranatha (2009), menjelaskan tujuan dari sistem informasi bagi penggunanya untuk membantu mereka melakukan tugas mereka dengan efisien dan efektif, namun harus memenuhi tiga tujuan umum penyusunan sistem informasi akuntansi, antara lain; Untuk memperbaiki informasi yang diberikan oleh sistem dalam kualitas, ketepatan waktu atau struktur dan informasi tersebut; 2) untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, maksudnya memperbaiki daya andal informasi akuntansi dan menyediakan catatan yang lengkap sebagai pertanggung jawaban dalam melindungi harta perusahaan; 3) untuk menurunkan biaya dalam menyelenggarakan catatan akuntansi.

Ketiga tujuan tersebut haruslah dipertimbangkan pada waktu menyusun suatu sistem informasi akuntansi, supaya salah satu tujuan diatas diharapkan tidak ada yang terlewatkan. Sehingga sistem informasi akuntansi yang efisien dan efektif dapat memberikan informasi yang

handal dan dapat menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bebas dari kesalahan, tidak bias, dan jelas maksud dan tujuannya. Diperlukan data yang benar dan akurat untuk menghasilkan informasi yang mempunyai karakteristik-karakteristik tersebut.

Pengendalian Internal

Romney & Steinbart (2017), mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut “Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 merupakan pelaksanaan atas pasal 58 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan, kinerja,

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 merupakan hasil adaptasi dan konsep internal control yang telah direkomendasikan oleh *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)* pada tahun 1992. Pengendalian internal didefinisikan oleh COSO sebagai berikut. “Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi. Melalui pengertian di atas, COSO memberikan penekanan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yaitu sebagai media untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Unsur Sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, adalah:

1. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas, nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi/komite audit, gaya manajemen, gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

2. Penilaian risiko.

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal maupun eksternal yang dapat terjadi secara negatif dapat mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Risiko dapat timbul atau berubah karena berbagai keadaan.

3. Kegiatan pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktifitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktifitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktifitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

4. Informasi dan komunikasi.

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pemahaman, pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan,

menganalisa, mengklasikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan kewajiban.

5. Kegiatan Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, hal tersebut diungkapkan oleh Mardiasmo (2009)..

Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Ellwood (1993), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan

- (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
 3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
 4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakankebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni *disclosures* (pengungkapan – pengungkapandalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana

yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Pengaruh Sistem Informasi Akutansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian ini Julia Prasisca *et al* (2013), Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi yang berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat dioperasikan tanpa menggunakan komputer, akan tetapi keterlibatan komputer dalam menangani tugas–tugas manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu.

Penelitian Silvinia & Antoni (2016), menyatakan salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informas akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang

didasarkan pada *input* yang baik, proses yang baik dan *output* yang baik. Penelitian Juwita (2013) memperkuat bahwa implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ha₁: Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Penelitian ini Randal & Alvin dalam Ahmad F (2016), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Salah satu dari elemen sistem pengendalian internal tersebut yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan elemen dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar.

Penelitian Tuti H (2014), menyatakan aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut: A) Pengendalian Umum, meliputi organisasi

pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. b) Pengendalian Aplikasi, mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi yang telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa hasil pengolahan data dan transaksi benar dan sesuai keadaan, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

Ha₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Abdul & Syam (2012:281) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah dan terdapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan. Penelitian Elvira Z (2011:60) juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada

standar akuntansi pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat diperbandingkan. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Soleh & Suropto (2011:155) dalam Indra & Gatot (2003), yang menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bukeya (2014), mengenai besar pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan *“Performance information is necessary for the discharge of accountability and financial and accounting information is often emphasized in determining accountability”*, yang berarti bahwa penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Ha₃: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Jumlah responden yang di jadikan obyek penelitian adalah seluruh pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota komisioner Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota panitia pemungutan suara kecamatan (PPK) dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh atau sensus, sehingga semua populasi memiliki hak untuk dijadikan objek penelitian sehingga jumlah responden yang terkumpul dan layak untuk dijadikan obyek penelitian sebanyak 88 orang, maka metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah metode sampling jenuh atau sensus. Metode sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data

primer yaitu melakukan wawancara kepada staff keuangan, kepala Sub. bagian keuangan, dan sekretaris Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat. Data sekunder berupa literatur-literatur kepustakaan yang digunakan sebagai dasar teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pilkada dengan variabel independen sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan akuntabilitas. Dengan operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP)	Relevan: data yang digunakan jelas Handal: dapat dipertanggung jawabkan Dapat dibandingkan: bisa menjadi perbandingan kualitas setiap tahunnya. Dapat dipahami: bisa dijadikan informasi yang tepat (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP)	Interval
2	Sistem Informasi akuntansi (X1)	Sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Susanto, 2008:72)	Pengumpulan data dan pengolahan data transaksi Penyimpanan data transaksi Pemberian Informasi Efisiensi Kerja (Susanto, 2008:72)	Ordinal
3	Pengendalian Internal (X2)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (PP No.60 Tahun 2008 tentang SPI)	- Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan Pengendalian - Informasi dan Komunikasi - Pemantauan - Pengendalian Internal. (PP No.60 Tahun 2008 tentang SPI)	Interval

4	Akuntabilitas (X3)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. (Mardiasmo:2004).	- Integritas Keuangan - Pengungkapan - Ketaatan terhadap Peraturan perundang- undangan. (Mardiasmo: 2004).	Ordinal
---	--------------------	--	--	---------

Sumber : Data yang diolah 2019

Pengujian Instrumen Penelitian

Kuesioner yang merupakan instrumen dalam penelitian digunakan secara luas terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengukur reabilitas dan validitas dari alat ukur tersebut. Adapun pengujian validitas dan reliabilitas instrument ini adalah :

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan sudah tepat untuk mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas menggunakan *confirmatory factor analysis* dengan keputusan nilai *factor loading* > 0,3, hal tersebut diungkapkan oleh Hair *et al.* (2017). Penelitian ini pengujian validitas *instrument* yang digunakan adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan bantuan *SMARTPLS 3.0*, dimana setiap item pernyataan harus mempunyai *factor loading* yang lebih dari 0,05 sesuai dengan kriteria yang disarankan oleh Hair *et al.* (2010:116)

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden. Pengujian reliabilitas menggunakan keputusan nilai *cronbach alpha* yaitu sebesar 0,6. Adapun kriteria *cronbach alpha* > 0,6 maka dinyatakan *reliable*, dan nilai *cronbach alpha* ≤ 0,6 maka dinyatakan tidak *reliable*, hal tersebut diungkapkan oleh Sekaran (2016).

Jika *cronbach aplha* > 0,6 maka *reliable*

Jika *cronbach aplha* ≤ 0,6 maka tidak *reliable*.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis prediktif dengan metode *PLS-SEM* dengan menggunakan program statistik *SmartPLS* versi 3.2.4 yang dilakukan atas dasar paradigma penelitian yang dibuat sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil pengolahan data dengan

program ini adalah uji model struktural, yaitu uji model secara keseluruhan dan uji hipotesis. Model keseluruhan diuji dengan 2 cara, yaitu Penjelasan Varian Variabel Endogen dengan koefisien determinasi R^2 (*Explanation of target endogenous variable variance*), *Path coefficient β (Beta)*, dan Signifikansi Model Internal (*Inner model path coefficient sizes and significance*).

Berdasarkan metode statistik, batasan nilai R^2 yang biasa digunakan adalah sebagai berikut Wong dan Kwong (2013) dalam Firmandhani (2018), 0,75 adalah sangat menjelaskan, 0,5 adalah cukup menjelaskan, dan 0,25 adalah kurang menjelaskan (*R^2 of 0.75 is substantial, 0.50 is moderate, and 0.25 is weak*). *Path coefficient β (Beta)* digunakan untuk melihat besarnya pengaruh setiap variabel terhadap variabel lainnya. Apabila nilai koefisien yang didapat kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut tidak secara langsung mempengaruhi variabel lainnya. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat hasil nilai T pada tingkat kepercayaan 0,05 dan *path coefficient (Beta)* dari tiap hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05, maka hipotesis dinyatakan dapat diterima apabila nilai $T > 1,96$. Signifikansi dengan nilai T

ini didapat dengan menjalankan *bootstrapping* pada program statistik yang digunakan.

Hair *et al.* (2013), mengemukakan bahwa langkah – langkah dalam melakukan pemodelan *PLS-SEM* sebagai berikut:

1. Merancang Model Struktural (*inner model*). Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian.
2. Merancang Model Pengukuran (*outer model*). Perancangan model pengukuran (*outer model*) dalam PLS sangat penting karena terkait dengan apakah indikator bersifat refleksif atau formatif
3. Mengkonstruksi diagram Jalur. Apabila langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka agar hasilnya lebih mudah dipahami, hasil perancangan *inner model* dan *outer model* tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur.
4. Konversi diagram Jalur ke dalam sistem persamaan: *outer mode*, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan *variabel*

manifesnya. *Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel *manifest* diskala *zero means* dan unit varian sama dengan satu, sehingga parameter lokasi (*parameter konstanta*) dapat dihilangkan dari model.

5. Estimasi. Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil (*least square methods*). Proses perhitungan dilakukan dengan cara literasi, dimana literasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi tiga hal, yaitu : *Weight estimate* digunakan untuk menciptakan skor variabel laten, Estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dengan indikatornya, *Means* dan lokasi parameter (nilai *konstanta regresi, intersep*) untuk indikator dan variabel laten.
6. Evaluasi kriteria *goodness-of-fit* atau kebaikan model. Indeks kesesuaian dan

cut-off value yang harus dipenuhi untuk dapat digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak dapat dilihat sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota karyawan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota panitia pemungutan suara kecamatan (PPK) dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden disetiap institusi yang menjadi tempat penelitian. Kuesioner diedarkan dari tanggal 8 Juli 2019 sampai 16 Juli 2019. Total kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 88 kuesioner. Dari 88 (100%) kuesioner yang disebarkan, 88 (100%) kuesioner diterima kembali. Total dari 88 (100%) yang diterima, 80 kuesioner atau (90,91%) dapat diolah.

Analisis Statistik Dekriptif

Data yang telah terkumpul dari kuesioner yang telah disebarkan ditabulasi dengan tujuan sebagai alat analisis data.

Hasil tabulasi tersebut diolah menghasilkan deskripsi statistik variabel menggunakan program SPSS versi 13.0 penelitian, seperti yang tampak pada tabel dan program Smart_PLS versi 3.3 yang 2 berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif Sebelum Dilakukan Pembuangan yang tidak valid

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Rata-rata Teoritis	Kisaran Aktual	Rata - rata aktual	Std. Deviation
KLK	80	9 - 45	27	31 – 45	36.250	3.640
AK	80	9 - 45	27	28 – 40	33.150	2.921
PI	80	33 - 165	99	112 – 151	130.600	9.852
SIA	80	20 - 100	60	54 – 99	76.850	10.556

Sumber: Data primer diolah, 2019

Tabel 3 Statistik Deskriptif Setelah Dilakukan Pembuangan yang tidak valid

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Rata-rata Teoritis	Kisaran Aktual	Rata - rata aktual	Std. Deviation
KLK	80	7 - 35	21	24 – 35	28.25	2.84
AK	80	2 - 10	6	6 – 10	7.80	1.17
PI	80	13 - 70	42	45 – 67	55.25	5.37
SIA	80	18 - 90	54	47 – 89	69.00	9.86

Sumber: Data primer diolah, 2019

Analisis Data

Evaluasi *Measurement (Inner) Model*

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk

konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 4 merupakan hasil estimasi *R-square* dengan menggunakan *SmartPLS*

Tabel 4 Nilai *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
KLK	0.671	0.658

Sumber: Data primer diolah, 2019

Prinsip pada penelitian ini yaitu dipengaruhi oleh Sistem informasi menggunakan 1 buah variabel yang akuntansi, Pengendalian internal dan dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu akuntabilitas, tabel 4.4 menunjukkan nilai variabel kualitas laporan keuangan yang *R-square* sebesar 0,671, hasil ini

menunjukkan bahwa 67,1% variabel akuntansi, pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan dapat akuntabilitas dipengaruhi oleh variabel sistem informasi

Variance Extracted Validity

Tabel 5 Variance Extracted Validity

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
AK	0.777
KLK	0.530
PI	0.502
SIA	0.597

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Validitas *average variance extracted* dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran yang terlihat pada tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstruk KLK, terlihat dengan nilai *average variance extracted* (AVE) sebesar 0.530 yang lebih besar dari 0.5 sehingga dapat dikatakan bahwa *variable* ini valid.
- b. Konstruk SIA, terlihat dengan nilai *average variance extracted* (AVE) sebesar 0.597 yang lebih besar dari 0.5 sehingga dapat dikatakan bahwa *variable* ini valid.
- c. Konstruk PI, terlihat dengan nilai *average variance extracted* (AVE)

- sebesar 0.502 yang lebih besar dari 0.5 sehingga dapat dikatakan bahwa *variable* ini valid.
- d. Konstruk AK, terlihat dengan nilai *average variance extracted* (AVE) sebesar 0.777 yang lebih besar dari 0.5 sehingga dapat dikatakan bahwa *variable* ini valid.

Discriminant Validity

Pengujian *discriminant validity* dilakukan untuk membuktikan apakah indikator pada suatu konstruk akan mempunyai *loading factor* terbesar pada konstruk yang dibentuknya dari pada *loading factor* dengan konstruk yang lain. Pengujian dengan menggunakan metode *Fornell-Larcker Criterion* pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 6 Discriminant validity

	AK	KLK	PI	SIA
AK	0.881			
KLK	0.565	0.728		
PI	0.544	0.760	0.709	
SIA	0.206	0.664	0.704	0.773

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas, **Composite Reliability dan Cronbach's** menunjukkan nilai *discriminant validity* **Alpha** yang baik oleh karena nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Variable AK sebesar 0.881, variable KLK sebesar 0.728, variable PI sebesar 0.709 dan variable SIA sebesar 0.773 yang semuanya lebih besar dari 0.70.

Uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Berikut ini adalah hasil pengujian *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari *Smart PLS*:

Tabel 7 Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
AK	0.874	0.713
KLK	0.886	0.849
PI	0.933	0.923
SIA	0.963	0.959

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *cronbach's alpha* di atas 0,60. Hasil *output SmartPLS* di atas semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *cronbach's alpha* di atas 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Pengujian Model Struktural (Bootstrapping)
Model struktural dalam PLS di evaluasi dengan menggunakan R² untuk variabel dependen dan nilai koefisien *path* untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path*.

Tabel 8 Path Coefficients (Mean, STDEV, t-Value)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
SIA → KLK	0.363	0.353	0.121	2.992	0.003

PI → KLK	0.338	0.363	0.149	2.274	0.023
AK → KLK	0.306	0.290	0.106	2.878	0.004

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bedasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat nilai nilai *p-value* sebesar 0.003, dibawah 5%, dengan nilai *original sample estimate* adalah sebesar 0,363. Nilai *original sample estimate* positif mengindikasikan bahwa Sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan (KLK). Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama diterima.**

Pengaruh Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bedasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat nilai nilai *p-value* sebesar 0.023, dibawah 5%, dengan nilai *original sample estimate* adalah sebesar 0,338. Nilai *original sample estimate* positif mengindikasikan bahwa Pengendalian interal (PI) berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan (KLK). Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua diterima.**

Pengaruh Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bedasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat nilai nilai *p-value* sebesar 0.004 dibawah 5%, dengan *original sample estimate* adalah sebesar 0,306. Nilai *original sample estimate* positif mengindikasikan bahwa akuntabilitas (AK) berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan (KLK). Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga diterima.**

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bedasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan (KLK). Sistem informasi akuntansi adalah Sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/ komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Elemen-elemen Sistem informasi akuntansi yang terdiri dari Sumber daya manusia (SDM) yang sudah terlatih, memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, Menjalankan setiap prosedur keuangan dan akuntansi, adanya Formulir Data Keuangan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan seperti transaksi kas, persediaan, piutang, aktiva tetap, penjualan dan biaya, *Hardware* berupa seperangkat komputer yang sudah terhubung dengan jaringan dan berbagai pelengkap pendukung lainnya seperti *accounting software*.

Pengaruh Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengendalian internal (PI) berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan (KLK). Sistem pengendalian internal pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan terhadap aset negara serta

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin baik sistem pengendalian internal dalam penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, maka hal tersebut akan meningkatkan Kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad (2016).

Menurut penelitian Permadi (2013), menyatakan bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dia juga menyebutkan dengan adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik.

Internal Control adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan kekayaan

yang wajar mengenai pencapaian tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Pengaruh Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan dorongan kejiwaan yang harus ada dalam diri akunting pemerintah dimana dengan dorongan kejiwaan tersebut akunting pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan akibat dari tindakan tersebut didalam lingkungan dimana akunting pemerintah berada. Semakin tinggi akuntabilitas akunting pemerintah atau penyelenggara negara maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, yang meminimalisasi ketidakpercayaan dari masyarakat sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut Ulum (2010), menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Wujud dari akuntabilitas pada penelitian ini yang diinginkan yakni *disclosures* pengungkapan –pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah; 1) Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; 2) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; 3)

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Keterbatasan

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan; 1) Obyek penelitian ini hanya terdiri dari orang yang terkait dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Pusat atau pihak - pihak yang terkait dengan laporan keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga keputusannya tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh KPU karena obyeknya hanya wilayah Jakarta pusat; 2) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, sehingga keputusannya juga terbatas dari variabel tersebut, tidak bisa digunakan selain variabel tersebut; 3) Waktu survei yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat, yaitu hanya seminggu sehingga tidak bisa memfollow up kuesioner-kuesioner yang tidak lengkap, sehingga jumlah responden yang diperoleh pun relatif sedikit, sehingga kesimpulannya pun akan berbeda jika cakupannya responden diperluas karena waktunya juga panjang.

Saran

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah; 1) diharapkan pihak Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan; 2) kepada Peneliti Selanjutnya untuk menambah variabel bebas yang lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti pemanfaatan teknologi informasi, memperluas pihak yang disertakan dalam penelitian atau memperbanyak jumlah sampel responden dan menambah waktu survei penelitian, sehingga kedepannya semua responden memiliki hak yang sama tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani. (2004). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Rumah Sakit Haji Jakarta. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bukeya, M. (2014). *Quality of Accounting Information and Financial Performance of Uganda's American Journal of Research Communication*, 183-203.
- Daranatha, S. (2009). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ellwood. (1993). *Parish and town councils: Financial accountability and*

- management. Local Government Studies*, 368-386.
- Firmandhani. (2018). *The Role Of Religiosity In Improving The Intention Of Buying Sharia Micro Insurance Products. Case Study Of Bogor Bmt Customers*. Review of Islamic Economics and Finance Vol 1 No. 1. Indonesia, I. A. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba.
- Julia P *et al.* (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Lister PT.PLN (Persero) Kota Palembang. *Akuntansi*, 1-10.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 201-214.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Unit Penerbit.
- Kusumah. (2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD/ OPD Pemerintahan). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Midjan & Susanto. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi 1*. Bandung: Lingga Jaya.
- Nordiawan. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permadi. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemda terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: Universitas Widyatama.
- Romney & Steinbart. (2017). *Accounting Information Systems*. New York: Pearson.
- Silvinia & Antoni. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Jawa Barat. *Profita*, 24-36.
- Tanjung, A. H. (2008). *Akuntansi Pemerintahan Daerah & Konsep Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM PRES.
- <http://www.koran-jakarta.com/predikat-wtp-jadi-semangat-kpu/1>. diakses Senin 11 Februari 2018. <https://www.beritasatu.com/bisnis/471458-kpu-anggaran-pemilu-dan-pilkadabisa-dorong-perekonomian->

[daerah.html](#) diakses Selasa 12 Februari
2018.

